

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 032.07.2.290145/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
- 2. Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
- 3. Provinsi : (29) BANTEN
- 4. Kode>Nama Satker : (290145) LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG
- Sebesar : Rp. 16.345.154.000 (ENAM BELAS MILIAR TIGA RATUS EMPAT PULUH LIMA JUTA SERATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir

Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	12.155.154.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	4.190.000.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN S E R A N G (020) Rp. 16.345.154.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

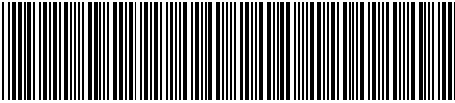
ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 032.07.2.290145/2025



DS:8500-8896-0636-5966

Satker : (290145) LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG

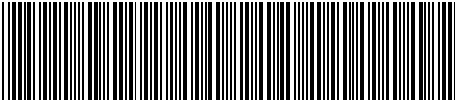
04	EKONOMI	Rp.	12.405.154.000
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	Rp.	12.405.154.000
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp.	3.940.000.000
05.04	KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	Rp.	3.940.000.000

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 032.07.2.290145/2025

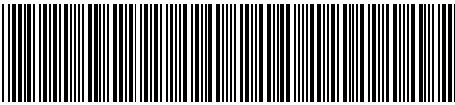


DS:8500-8896-0636-5966

Satker : (290145) LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG

FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	Rp.	3.115.000.000
FD.2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	Rp.	3.115.000.000
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Rp.	1.075.000.000
HB.2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp.	250.000.000
HB.2366	Penataan Ruang Laut	Rp.	825.000.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	12.155.154.000
WA.2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Rp.	12.155.154.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.2.290145/2025
I A. INFORMASI KINERJA



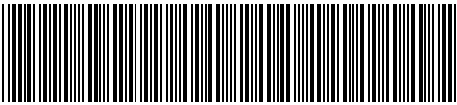
DS:8500-8896-0636-5966

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : (29) BANTEN
Kode>Nama Satker : (290145) LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG

Halaman : I A. 1

Program	:	032.07.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup				3.115.000.000
Kegiatan	:	2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan				3.115.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Luas Kawasan Konservasi Baru				
		2. 02	Luas Kawasan Konservasi yang Efektif Dikelola (kumulatif)				
		3. 03	Tingkat Kinerja Pengelolaan Kawasan Konservasi (%)				
		4. 04	Tingkat Kinerja Pengelolaan Konservasi Biota Perairan (25 jenis) (%)				
Klasifikasi Rincian Output	1	:	2362.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	50.000.000
Rincian Output	:	01	PBW.001	Rekomendasi Pengelolaan Konservasi Ekosistem (PN)	1.00	Rekomendasi Kebijakan	50.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	2362.PCA	Perizinan Produk	2,00	Produk, Keputusan	1.900.000.000
Rincian Output	:	01	PCA.002	Perizinan Produk Konservasi Biota Perairan (PN)	2.00	Produk	1.900.000.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	2362.PEE	Kemitraan	1,00	Kesepakatan	100.000.000
Rincian Output	:	01	PEE.001	Kerjasama, Jejaring dan Kemitraan Konservasi Ekosistem (PN)	1.00	Kesepakatan	100.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	2362.QMA	Data dan Informasi Publik	1,00	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	665.000.000
Rincian Output	:	01	QMA.002	Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan (PN)	1.00	dokumen	665.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	2362.REB	Konservasi Jenis/Spesies	1,00	Jenis	250.000.000
Rincian Output	:	01	REB.001	Konservasi Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendic Cites (kumulatif) (PN)	1.00	Jenis	250.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.2.290145/2025
I A. INFORMASI KINERJA



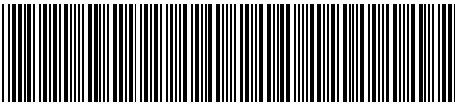
DS:8500-8896-0636-5966

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : (29) BANTEN
Kode>Nama Satker : (290145) LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	6	:	2362.SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	30,00	Orang, Kegiatan	150.000.000
Rincian Output		:	01	SCC.002 Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Kompetensi nya	(PN)	30.00 Orang	150.000.000
Program		:	032.07.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			1.075.000.000
Kegiatan		:	2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			250.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang diberikan bantuan sarana ekonomi produktif (kelompok)			
			2. 01	Pulau-pulau kecil yang dimanfaatkan dan ditingkatkan nilai investasinya (pulau) (kumulatif)			
			3. 02	Nilai Kemandirian Masyarakat Hukum Adat (Nilai)			
			4. 02	Pulau-pulau kecil terluar yang meningkat aksesibilitasnya (Pulau) (kumulatif)			
Klasifikasi Rincian Output	1	:	2365.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	250.000.000
Rincian Output		:	01	PBW.001 Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	(PN)	1.00 Rekomendasi Kebijakan	250.000.000
Kegiatan		:	2366	Penataan Ruang Laut			825.000.000
		:	1. 01	Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar wilayah (RZ KAW)			
			2. 01	Persentase Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang diterbitkan			
			3. 02	Kawasan Strategis Nasional yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN)			
			4. 02	Persentase KKPR L yang dimonitoring dan evaluasi (%)			
			5. 03	Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)			
			6. 04	Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun			
			7. 05	Perairan KSNT Non PPKT yang memiliki Rencana Zonasi ditetapkan melalui Peraturan Perundangan			
			8. 06	Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.2.290145/2025
I A. INFORMASI KINERJA

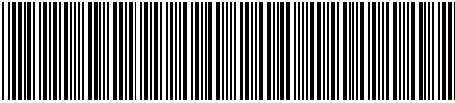


DS:8500-8896-0636-5966

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : (29) BANTEN
Kode>Nama Satker : (290145) LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG

Klasifikasi Rincian Output	2	:	2366.PBT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Materi	825.000.000
Rincian Output		:	01	PBT.009 Rekomendasi kebijakan verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang beresiko rendah (PN)	1.00	Teknis, Dokumen Rekomendasi Kebijakan	825.000.000
Program		:	032.07.WA	Program Dukungan Manajemen			12.155.154.000
Kegiatan		:	2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut			12.155.154.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Nilai SAKIP DJPKRL (Nilai)			
			2. 02	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPKRL (Nilai)			
			3. 03	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup DJPKRL (indeks)			
			4. 04	Nilai Kinerja Anggaran KKP (nilai)			
			5. 05	Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan DJPKRL (nilai)			
			6. 06	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup DJPKRL (persen)			
			7. 07	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPKRL (%)			
			8. 08	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL (%)			
			9. 09	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPKRL (%)			
			10. 10	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Ditjen PKRL			
			11. 11	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (%)			
Klasifikasi Rincian Output	1	:	2367.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	11.755.154.000
Rincian Output		:	01	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	Layanan	70.000.000
			02	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	52.154.000
			03	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	11.633.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.2.290145/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:8500-8896-0636-5966

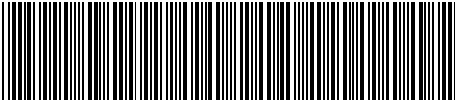
Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : (29) BANTEN
Kode>Nama Satker : (290145) LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG

Klasifikasi Rincian Output	2	:	2367.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	70,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	244.000.000
Rincian Output		:	01 EBC.954	Layanan Manajemen SDM	70.00	Orang	244.000.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	2367.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	156.000.000
Rincian Output		:	01 EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.00	Dokumen	31.000.000
		:	02 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.00	Dokumen	75.000.000
		:	03 EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Dokumen	50.000.000

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

ttd.
Victor Gustaaf Manoppo
NRP. 69030175

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.2.290145/2025
I B. SUMBER DANA



DS:8500-8896-0636-5966

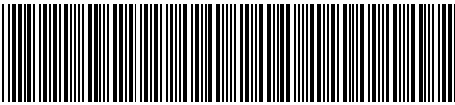
Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : (29) BANTEN
Kode>Nama Satker : (290145) LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	16.345.154.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	12.155.154.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.	4.190.000.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.2.290145/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:8500-8896-0636-5966

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : (29) BANTEN
Kode>Nama Satker : (290145) LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG
Kewenangan : (KD)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
290145	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	7.728.000	8.617.154	-	-	-	16.345.154	29 . 53	
032.07.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	-	3.115.000	-	-	-	3.115.000		
2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	-	3.115.000	-	-	-	3.115.000		
2362.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan (29.53 BANTEN / KOTA SERANG)	-	50.000	-	-	-	50.000		
04	PNBP	-	50.000	-	-	-	50.000		
2362.PCA	Perizinan Produk (29.53 BANTEN / KOTA SERANG)	-	1.900.000	-	-	-	1.900.000		
04	PNBP	-	1.900.000	-	-	-	1.900.000		
2362.PEE	Kemitraan (29.53 BANTEN / KOTA SERANG)	-	100.000	-	-	-	100.000		
04	PNBP	-	100.000	-	-	-	100.000		
2362.QMA	Data dan Informasi Publik (29.53 BANTEN / KOTA SERANG)	-	665.000	-	-	-	665.000		

DS:8500-8896-0636-5966

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : (29) BANTEN
Kode>Nama Satker : (290145) LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

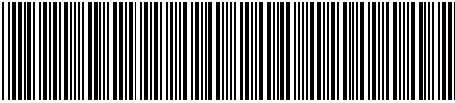
Abstract

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : (29) BANTEN
Kode>Nama Satker : (290145) LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.2.290145/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:8500-8896-0636-5966

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : (29) BANTEN
Kode>Nama Satker : (290145) LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51] 3	BARANG [52] 4	MODAL [53] 5	BANTUAN SOSIAL [57] 6	LAIN-LAIN [58] 7	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	156.000	-	-	-	156.000	020@	
JUMLAH		7.728.000	8.617.154	-	-	-	16.345.154		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

ttd.
Victor Gustaaf Manoppo
NRP. 69030175

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : (29) BANTEN
Kode>Nama Satker : (290145) LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

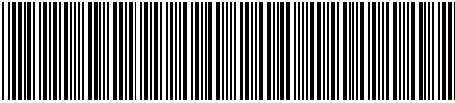
DS:8500-8896-0636-5966

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.2.290145/2025
IV A. B L O K I R



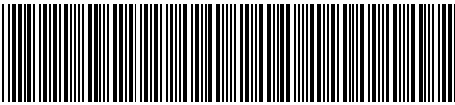
DS:8500-8896-0636-5966

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : [29] BANTEN
Kode dan Nama Satker : [290145] LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
290145	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.474.300
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 4.321.419		Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNPB
	52 Belanja Barang Rp. 4.321.419	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
032.07.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNPB)
2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 188.700
2362.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan		Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNPB
	521211 Belanja Bahan(PNPB)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.000	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNPB)
	belum dilengkapi ijin penggunaan PNPB		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 31.725
Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNPB
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNPB)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 40.000	2362.PEE	Kemitraan
	Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNPB	521211	Belanja Bahan(PNPB)
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 11.200
2362.PCA	Perizinan Produk		belum dilengkapi ijin penggunaan PNPB
	521211 Belanja Bahan(PNPB)	Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 77.475	522151	Belanja Jasa Profesi(PNPB)
	belum dilengkapi ijin penggunaan PNPB		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.600
Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		belum dilengkapi ijin penggunaan PNPB
522151	Belanja Jasa Profesi(PNPB)	Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 37.800	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNPB)
	belum dilengkapi ijin penggunaan PNPB		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 75.000
Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNPB
522191	Belanja Jasa Lainnya(PNPB)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 90.000	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNPB)
	belum dilengkapi ijin penggunaan PNPB		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.200
Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNPB
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNPB)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.2.290145/2025
IV A. B L O K I R



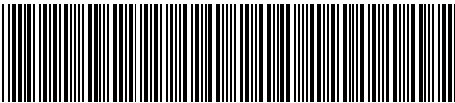
DS:8500-8896-0636-5966

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : [29] BANTEN
Kode dan Nama Satker : [290145] LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
2362.QMA	Data dan Informasi Publik	2362.SCC	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 39.234		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.600
	belum dilengkapi ijin penggunaan PNB		belum dilengkapi ijin penggunaan PNB
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	522141 Belanja Sewa(PNBP)		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 27.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 115.000
	belum dilengkapi ijin penggunaan PNB		Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNB
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 18.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 27.200
	belum dilengkapi ijin penggunaan PNB		Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNB
2362.REB	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	2362.SCC	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP)		Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 390.766		521211 Belanja Bahan(PNBP)
	belum dilengkapi ijin penggunaan PNB		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.400
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		belum dilengkapi ijin penggunaan PNB
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 190.000		522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)
	Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNB		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.400
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		belum dilengkapi ijin penggunaan PNB
	Konservasi Jenis/Spesies		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 82.150		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 55.000
	belum dilengkapi ijin penggunaan PNB		Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNB
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522141 Belanja Sewa(PNBP)		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 13.050		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 79.200
	belum dilengkapi ijin penggunaan PNB		Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNB

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.2.290145/2025
IV A. B L O K I R

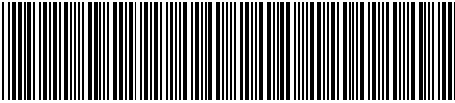


DS:8500-8896-0636-5966

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : [29] BANTEN
Kode dan Nama Satker : [290145] LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN	
032.07.HB 2365 2365.PBW	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	032.07.WA 2367 2367.EBA	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)	
	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 21.600	
	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan		belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP	
			521211 Belanja Bahan(PNBP)	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 23.475	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
			belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 550.000
			Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
			522141 Belanja Sewa(PNBP)	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 33.000	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
			belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 40.800
			Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
			522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.600	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)
			belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 118.144
			Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 181.425	Program Dukungan Manajemen			
Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut			
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Layanan Dukungan Manajemen Internal			
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)			
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.500	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 32.401			
Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP	Arahan Presiden dalam sidang kabinet			
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
2366	Penataan Ruang Laut	2367.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	
2366.PBT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	521211 Belanja Bahan(PNBP)	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 52.207		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 94.456	Arahan Presiden dalam sidang kabinet		
	belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.2.290145/2025
IV A. B L O K I R



DS:8500-8896-0636-5966

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : [29] BANTEN
Kode dan Nama Satker : [290145] LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG

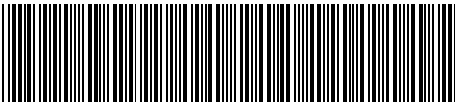
Halaman : IV.A. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
2367.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 46.811 Arahan Presiden dalam sidang kabinet Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

ttd.
Victor Gustaaf Manoppo
NRP. 69030175

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.2.290145/2025
IV B. C A T A T A N



DS:8500-8896-0636-5966

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : [29] BANTEN
Kode dan Nama Satker : [290145] LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

ttd.
Victor Gustaaf Manoppo
NRP. 69030175